



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pasal 4 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dinyatakan bahwa pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI
KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
11. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan Desa baru yang merupakan pemekaran beberapa desa di Kecamatan Ambalau yang meliputi:

- a. Desa Buntut Sabon dimekarkan menjadi 4 (empat) desa, yaitu Desa Buntut Sabon (Desa Asal/Induk), Desa Nanga Mentomoi (Desa Pemekaran), Desa Sungai Tambun (Desa Pemekaran) dan Desa Riam Sabon (Desa Pemekaran);
- b. Desa Nanga Menakon dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Nanga Menakon (Desa Asal/Induk) dan Desa Nanga Ukai (Desa Pemekaran);
- c. Desa Nanga Kesange dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Nanga Kesange (Desa Asal/Induk), Desa Mensuang (Desa Pemekaran) dan Desa Dahtah Bungai (Desa Pemekaran);

d. Desa...

- d. Desa Nanga Kemangai dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Nanga Kemangai (Desa Asal/Induk), Desa Lunjan Tingang (Desa Pemekaran) dan Desa Bukit Tinggi (Desa Pemekaran);
- e. Desa Nanga Ambalau dimekarkan menjadi 4 (empat) desa, yaitu Desa Nanga Ambalau (Desa Asal/Induk), Desa Bukai Tukun (Desa Pemekaran), Desa Nusa Poring (Desa Pemekaran) dan Desa Puruk Beribit (Desa Pemekaran);
- f. Desa Nanga Sake dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Nanga Sake (Desa Asal/Induk), Desa Pulo Sabhang (Desa Pemekaran) dan Desa Patih Jepara (Desa Pemekaran);
- g. Desa Tanjung Andan dimekarkan menjadi 4 (empat) desa, yaitu Desa Tanjung Andan (Desa Asal/Induk), Desa Korong Daso (Desa Pemekaran), Desa Luting Mingan (Desa Pemekaran) dan Desa Kolangan Juoi (Desa Pemekaran);
- h. Desa Buntut Pimpin dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Buntut Pimpin (Desa Asal/Induk) dan Desa Nanga Rade (Desa Pemekaran);
- i. Desa Kepala Jungai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Kepala Jungai (Desa Asal/Induk) dan Desa Jengkarang (Desa Pemekaran);
- j. Desa Nanga Menantak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Nanga Menantak (Desa Asal/Induk) dan Desa Deme (Desa Pemekaran);
- k. Desa Buntut Purun dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Buntut Purun (Desa Asal/Induk) dan Desa Nanga Pahangan (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah Desa di Kecamatan Ambalau menjadi 33 (tiga puluh tiga) Desa, yaitu:

- a. Desa Buntut Sabon;
- b. Desa Nanga Menakon;
- c. Desa Nanga Kesange;
- d. Desa Nanga Kemangai;
- e. Desa Nanga Ambalau;
- f. Desa Nanga Sake;
- g. Desa Tanjung Andan;
- h. Desa Buntut Pimpin;
- i. Desa Kepala Jungai;
- j. Desa Nanga Keremue;
- k. Desa Nanga Menantak;
- l. Desa Buntut Purun;
- m. Desa Nanga Sakai;
- n. Desa Nanga Mentomoi;
- o. Desa Sungai Tambun;
- p. Desa Riam Sabon;
- q. Desa Nanga Ukai;
- r. Desa Mensuang;
- s. Desa Dahtah Bungai;
- t. Desa Lunjan Tingang;
- u. Desa Bukit Tinggi;
- v. Desa Bukai Tukun;
- w. Desa Nusa Koring;
- x. Desa Puruk Beribit;
- y. Desa Pulo Sabhang;
- z. Desa Patih Jepara;
- aa. Desa Korong Daso;
- ab. Desa Luting Mingan;
- ac. Desa Kolangan Juoi;

ad. Desa...

- ad. Desa Nanga Rade;
- ae. Desa Jengkarang;
- af. Desa Deme; dan
- ag. Desa Nanga Pahangan.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Nanga Mentomoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntut Purun;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riam Sabon; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Menantak.
- (2) Batas wilayah Desa Sungai Tambun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riam Sabon;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntut Sabon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Menakon; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Kesange.
- (3) Batas wilayah Desa Riam Sabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Mentomoi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntut Sabon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Tambun; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Menakon.
- (4) Batas wilayah Desa Nanga Ukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Menakon;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Menantak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Sakai; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntut Sabon.
- (5) Batas wilayah Desa Mensuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merako Jaya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Menakon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dahtah Bungai; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntut Sabon.
- (6) Batas wilayah Desa Dahtah Bungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Kesange;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Menakon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Kesange; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mensuang.

(7) Batas...

- (7) Batas wilayah Desa Lunjan Tingang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahai Permai Kecamatan Serawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ambalau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Kemangai; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Jaya Kecamatan Serawai.
- (8) Batas wilayah Desa Bukit Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lunjan Tingang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kemangai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Merako Jaya Kecamatan Serawai; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Jaya Kecamatan Serawai.
- (9) Batas wilayah Desa Bukai Tukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puruk Beribit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ambalau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusa Koring; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tahai Permai Kecamatan Serawai.
- (10) Batas wilayah Desa Nusa Koring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukai Tukun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ambalau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Kemangai; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tahai Permai Kecamatan Serawai.
- (11) Batas wilayah Desa Puruk Beribit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Sake;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ambalau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukai Tukun; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Sake.
- (12) Batas wilayah Desa Pulo Sabhang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Patih Jepara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Sakai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Ambalau; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tahai Permai Kecamatan Serawai.
- (13) Batas wilayah Desa Patih Jepara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Sake;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntut Pimpin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulo Sabhang; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tahai Permai Kecamatan Serawai.

(14) Batas...

- (14) Batas wilayah Desa Korong Daso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Luting Mingan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Keremue;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serawai; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Luting Mingan.
- (15) Batas wilayah Desa Luting Mingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Andan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Andan; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (16) Batas wilayah Desa Kolangan Juoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Andan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Andan; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (17) Batas wilayah Desa Nanga Rade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntut Pimpin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntut Pimpin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Sakai; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntut Pimpin dan Desa Nanga Sake.
- (18) Batas wilayah Desa Jengkarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntut Sabon; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntut Sabon.
- (19) Batas wilayah Desa Deme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepala Jungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntut Purun; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Menantak.
- (20) Batas wilayah Desa Nanga Pahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Peraturan Daerah ini adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Menantak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntut Purun.

Pasal 5

- (1) Desa Nanga Mentomoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpusat di Dusun Nanga Mentomoi.
- (2) Desa Sungai Tambun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpusat di Dusun Nanga Kepingoi.
- (3) Desa Riam Sabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpusat di Dusun Sungai Pilang.
- (4) Desa Nanga Ukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berpusat di Dusun Ukai.
- (5) Desa Mensuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berpusat di Dusun Mensuang.
- (6) Desa Dahtah Bungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berpusat di Dusun Korong Keladan.
- (7) Desa Lunjan Tingang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berpusat di Dusun Sungai Ombak.
- (8) Desa Bukit Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berpusat di Dusun Raden Paku.
- (9) Desa Bukai Tukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpusat di Dusun Jabai.
- (10) Desa Nusa Koring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpusat di Dusun Ambalau Kiri.
- (11) Desa Puruk Beribit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpusat di Dusun Teluk Mudin.
- (12) Desa Pulo Sabhang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berpusat di Dusun Nanga Sepan.
- (13) Desa Patih Jepara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berpusat di Dusun Nanga Rebungai.
- (14) Desa Korong Daso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berpusat di Dusun Nanga Ledan.
- (15) Desa Luting Mingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berpusat di Dusun Nanga Pere.
- (16) Desa Kolangan Juoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berpusat di Dusun Nanga Barane.
- (17) Desa Nanga Rade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berpusat di Dusun Nanga Rade.
- (18) Desa Jengkarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berpusat di Dusun Jengkarang.
- (19) Desa Deme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berpusat di Dusun Deme.
- (20) Desa Nanga Pahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berpusat di Dusun Nanga Pahangan.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (20) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Kekayaan Desa induk yang berada pada wilayah Desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

(2) Paling...

- (2) Paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa baru hasil pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Definitif.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Camat Sintang memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembentukan BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Bagi Desa hasil pemekaran yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, paling lama 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa sampai terbentuknya pemerintahan Desa yang baru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Persiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan aparatur pemerintahan Desa, serta pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Desa Induk masih tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

TITIN SUMARNI, SH.,MH
Pembina

NIP. 19660510 199703 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN AMBALAU
KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km² atau sekitar 14 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat; (2) pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun); (3) rentang kendali pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa); serta (4) prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembentukan desa baru merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti *fee*/komisi dari pihak ketiga.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12...

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 20